

Judul : Pengkajian Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Kota Dumai
Tahun : 2007
Penulis : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
Kategori : Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Kajian **Pengembangan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Kota Dumai** dilatarbelakangi oleh kebutuhan Provinsi Riau untuk memperkuat kembali posisi dan daya saing ekonominya setelah perubahan administratif yang memisahkan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Kota Dumai dipandang memiliki posisi strategis karena berada pada jalur perdagangan internasional dan kawasan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Atas dasar tersebut, pengembangan Dumai sebagai kawasan perdagangan bebas atau kawasan ekonomi khusus dipertimbangkan sebagai instrumen untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekspor dan pendapatan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan regional.

Kajian bertujuan menentukan model pengembangan kawasan yang paling sesuai bagi Kota Dumai, yaitu antara **Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh, FTZ Enclave, atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**. Selain itu, kajian menganalisis tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat, kesiapan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai beserta stakeholder, serta permasalahan dan dampak yang diperkirakan muncul dari pengembangan kawasan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan partisipatif melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), penelusuran data sekunder, serta analisis kebijakan dengan melibatkan unsur pemerintah, DPRD, masyarakat, pengusaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Hasil kajian mengidentifikasi bahwa model pengembangan yang diarahkan untuk Kota Dumai adalah **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**. Implementasinya membutuhkan landasan legal-formal melalui regulasi pemerintah serta kesiapan infrastruktur sebagai prasyarat utama pembentukan kawasan. Dari sisi sosial, dukungan masyarakat relatif kuat. Hasil survei menunjukkan **86% masyarakat mendukung pelaksanaan KEK**, sementara 4% bersikap netral dan 10% tidak mendukung. Tingkat pemahaman masyarakat juga cukup baik, dengan **59,33% responden memiliki pemahaman yang baik** terhadap KEK.

Hasil survei pada halaman 9 juga memperlihatkan bahwa **74% responden memiliki sikap positif terhadap pelaksanaan KEK**, sedangkan 12% bersikap netral dan 14% negatif. Kesiapan pengembangan kawasan didukung oleh posisi geografis Dumai yang strategis, pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang positif, ketersediaan sarana transportasi, fasilitas ekonomi dan perdagangan, kawasan industri, sumber daya manusia, dinamika masyarakat, serta dukungan birokrasi dan administratif.

Di sisi lain, pengembangan KEK perlu mengantisipasi sejumlah persoalan strategis, khususnya terkait struktur kewenangan dan pengelolaan kawasan serta potensi dampak sosial-ekonomi. Kajian mengidentifikasi risiko berupa kemiskinan, pengangguran, penggusuran dan pengalihan lahan, migrasi serta persoalan kependudukan lainnya. Oleh karena itu, manfaat ekonomi kawasan perlu diimbangi dengan tata kelola kelembagaan yang kuat, peningkatan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur, dan kebijakan yang mampu mengelola dampak sosial pembangunan.

Kajian merekomendasikan dukungan Pemerintah Pusat dalam penetapan Kota Dumai sebagai KEK dan pendanaan infrastruktur melalui APBN, sedangkan Pemerintah Provinsi Riau diarahkan untuk memperkuat komitmen kepada pemerintah pusat serta memberikan dukungan APBD bagi pemantapan infrastruktur. Pada tingkat Kota Dumai, kajian merekomendasikan **Pelintung sebagai lokasi KEK**, penguatan infrastruktur, kebijakan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM, serta perbaikan pelayanan publik. Pembentukan Dewan Kawasan juga perlu merepresentasikan kepentingan secara aspiratif, objektif, dan demokratis serta didukung kajian lanjutan mengenai pengelolaan kawasan.